

ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP), DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Indrawan Saputra¹, Ayu Lestari Doloksaribu², Alexandra Hukum³

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Palangkaraya, Indonesia

Correspondence

Email:

No. Telp: 089693705822

ayulestaridoloksaribu1810@gmail.com

Submitted 28 April 2024

Accepted 04 Mei 2024

Published 05 Mei 2024

Abstrak

Studi ini dilakukan untuk mengkaji dampak Petumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP), serta Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan, dan mengidentifikasi faktor mana yang memberikan pengaruh paling signifikan pada kemiskinan. Wilayah yang menjadi cakupan penelitian adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Data yang digunakan bersumber dari referensi kepustakaan dan data resmi dari lembaga terkait, yang akan dianalisis melalui metode regresi berganda, uji simultan, dan uji parsial. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh paling dominan dalam menentukan tingkat kemiskinan. Perekonomian, UMP, dan tingkat pengangguran secara bersamaan berdampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun, hanya perkembangan perekonomian yang secara individual mempengaruhi kemiskinan.

Kata Kunci: *Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi (UMP), Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah pilar utama suatu negara; jika pembangunan ekonomi berhasil, maka bidang lain, seperti politik, hukum, pertanian, pendidikan, dan lainnya, akan sangat terbantu. Kemiskinan adalah pilar utama pembangunan ekonomi karena penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan kemampuan negara untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial. Jadi, menghapus kemiskinan adalah prioritas utama pembangunan.

Kemiskinan adalah masalah utama di negara berkembang, terutama di Indonesia. Kebijakan yang dapat menghilangkan dimensi kemiskinan harus memperhatikan seberapa dalam dan parah kemiskinan. Upaya menghilangkan kemiskinan harus dilakukan secara efektif dan melibatkan semua aspek kehidupan masyarakat.

Menurut provinsi, jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2023 berjumlah 25.899 ribu orang. Ini adalah peningkatan dalam kurun waktu empat tahun, dari 2019 hingga 2023. Hal ini menjadi hal yang negatif, yang menunjukkan bahwa rencana pembangunan yang telah dibuat belum dapat diterapkan dengan baik. Pada Maret 2023, BPS mencatat penduduk miskin Indonesia sebesar 9,36%. Peningkatan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan untuk mengakhiri kemiskinan belum cukup efektif. Ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat, sedikit lapangan pekerjaan, kurangnya akses ke pendidikan dan kesehatan, atau distribusi pendapatan yang tidak merata. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi, dengan jumlah penduduk sebesar 278.696,2 ribu pada tahun 2023. (BPS, 2023).

Kemiskinan adalah ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka

seperti makanan, pakaian, rumah, sekolah, dan perawatan medis. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, walaupun penurunan angka kemiskinan di setiap provinsi di Indonesia berlangsung lambat dan masih tinggi. Kalimantan Tengah adalah salah satu contoh, karena masih banyak warga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berikut adalah tabel yang menunjukkan Penduduk miskin di Kalimantan Tengah.:

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
2019	134,590	4,98
2020	132,940	4,82
2021	140,040	5,16
2022	145,100	5,28
2023	142,170	5,11

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

Tabel 1 menunjukkan peningkatan persentase yang relatif kecil dalam lima tahun terakhir. Walaupun demikian, pemerintah tetap memperhatikan tren ini ketika mereka Mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, terutama pada tahun 2024, yang diharapkan dapat membantu orang miskin dalam berbagai aspek, seperti pekerjaan dan pendidikan.

Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk Pertumbuhan ekonomi yang lamban, upah yang masih di bawah standar, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Penurunan tingkat kemiskinan di daerah tersebut menunjukkan program yang telah ditetapkan pemerintah telah berhasil. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang cepat harus disertai dengan hasil yang signifikan di seluruh sektor usaha. Ekonomi Kalimantan Tengah rata-rata berkembang sebesar 1,46% dalam lima tahun terakhir. Namun, pertumbuhan sebesar 1,21% terjadi pada tahun 2017–2019.

Standar upah minimum yang diterima masyarakat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Gaji minimum yang paling rendah dapat mencukupi kebutuhan dasar hidup (KDH), sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga, serta meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja. (Sumarsono, 2003) Selama lima tahun terakhir, dari 2019 hingga 2023, UMP terus meningkat, mencapai Rp 2.663.435,5 pada tahun 2019, dan terus meningkat hingga Rp 3.181.013 pada tahun 2023. Kenaikan UMP ini didasarkan pada upah minimum tahun yang lalu dikali inflasi, yang dihitung dari September tahun sebelumnya hingga September tahun berjalan, serta disesuaikan dengan pertumbuhan domestik bruto.

Sampai saat ini, pemerintah nasional dan pemerintah daerah belum berhasil mengatasi pengaruh tingkat pengangguran terhadap penurunan tingkat kemiskinan, karena satu-satunya cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan memastikan bahwa orang yang menganggur memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga masyarakat tidak akan miskin.

Pada tahun 2023, Provinsi Kalteng mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,16%, atau 4,2%, atau 54.000 orang. Faktor yang mempengaruhi penurunan ini termasuk peningkatan jumlah angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang disebabkan oleh banyaknya pelajar dan sarjana yang baru lulus dari perguruan tinggi. Lulusan yang memiliki ijazah cenderung memilih pekerjaan karena mereka percaya bahwa memiliki ijazah dapat memenuhi ekspektasi yang tinggi dan meningkatkan kesempatan kerja.

Masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: (1) Apakah interaksi antara tingkat pengangguran, upah minimum provinsi (UMP), dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi

tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah secara simultan? (2) Apakah interaksi antara tingkat pengangguran, upah minimum provinsi (UMP), dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah secara parsial? (3) Apakah ada faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah?

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk menentukan secara simultan dan parsial bagaimana Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah; dan (2) untuk mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah

KAJIAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika satu atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya untuk menjalani kehidupan yang layak. Kebutuhan dasar tersebut mencakup pangan (makanan bergizi), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal layak), akses pendidikan, dan kesehatan. Seseorang dikategorikan miskin jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, yakni tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimumnya. Kemiskinan dapat didefinisikan dari dua sisi, kemiskinan absolut dan kemiskinan relative

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Hal ini diukur dari peningkatan nilai produk domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto (PNB) dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika terdapat penambahan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi yang meningkatkan output barang dan jasa dalam perekonomian. Tingkat PDRB suatu negara dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonominya.

Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah minimum provinsi (UMP) merupakan standar minimum upah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebagai upah bulanan terendah bagi pekerja di wilayah provinsi tersebut. Penetapan UMP bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya. UMP menjadi patokan upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya agar sesuai dengan ketentuan pemerintah. Besaran UMP di setiap provinsi dapat berbeda-beda, tergantung pada komponen kebutuhan hidup layak, inflasi, dan kondisi perekonomian di masing-masing daerah.

Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka mengacu pada bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang bekerja atau yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka dihitung sebagai persentase dari total angkatan kerja. Pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidaksesuaian keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, berkurangnya lapangan pekerjaan akibat resesi ekonomi, atau kurangnya informasi tentang lowongan pekerjaan

Penelitian Terdahulu

Dalam analisisnya di Provinsi Aceh pada tahun (2018), Khairil Ihsan menemukan bahwa

upah minimum provinsi (UMP) memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Inflasi memiliki dampak positif namun tidak signifikan, dan pengangguran memiliki dampak negatif namun tidak signifikan. Secara keseluruhan, UMP, inflasi, dan pengangguran memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan di Aceh.

Nila Kurnia Dewi (2021) dalam penelitiannya "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur" menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengangguran memiliki efek positif dan signifikan, sementara inflasi memiliki efek positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

Pradikta Rizki Suci (2017) dalam "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa" menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Upah minimum memiliki efek negatif dan signifikan, sementara inflasi memiliki efek positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.

Seri Jefry A.W (2016) dalam penelitiannya di Indonesia periode 1995-2014 menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki efek signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, investasi tidak memiliki efek signifikan terhadap kemiskinan. Dalam sintesis, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah, dan investasi memiliki efek signifikan terhadap kemiskinan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Variabel yang dianalisis meliputi tingkat pengangguran, upah minimum provinsi (UMP), dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah. Data yang digunakan adalah rangkaian waktu, atau runtun waktu (*Time Series*), tahunan.. Wilayah yang menjadi fokus dalam studi ini adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi yang dianalisis adalah data berupa seri waktu yang mencakup indikator Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Provinsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Populasi ini terdiri dari subjek yang memiliki ciri-ciri tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi yang mewakili karakteristik populasi tersebut. Sampel yang dipilih adalah data seri waktu tahunan mulai tahun 2014 hingga 2023, meliputi data tentang Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Provinsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Tengah. pengangguran selama 10 Tahun dari tahun 2014 – 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga jumlah sampel sebanyak 10 sampel.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, yaitu persentase orang miskin di Provinsi Kalimantan Tengah. Tiga variabel independen juga digunakan.. Pertama, Tingkat Pengangguran (X_1) yang didapat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, atau tingkat pengangguran terbuka. Kedua, Upah Minimum Provinsi (UMP) (X_2) yang merupakan Gaji minimum yang

ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam satuan Rupiah. Ketiga, Pertumbuhan Ekonomi (X3) yang dilihat dari persentase pertumbuhan ekonomi tahunan Kalimantan Tengah berdasarkan harga konstan

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan menyalin dan mengumpulkan data-data relevan dari berbagai sumber seperti instansi terkait dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data-data tersebut kemudian dikompilasi sebagai bahan untuk melakukan analisis dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang berasal dari dokumentasi resmi serta studi kepustakaan dari berbagai sumber terpercaya yang relevan dengan variabel-variabel yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek yang diteliti apa adanya, dalam hal ini tingkat kemiskinan, Tingkat pengangguran, upah minimum provinsi, dan tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor dari variabel independen, yaitu Tingkat Pengangguran (X1), Upah Minimum Provinsi (X2), dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) terhadap variabel dependen Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Penelitian ini menggunakan model regresi logaritma atau logaritma natural. Hal ini disebabkan adanya perbedaan satuan dan besaran dari variabel bebas yang digunakan dalam persamaan. Pemilihan model logaritma sejalan dengan pendapat Imam Ghozali (2005) yang menyatakan bahwa penggunaan logaritma natural bertujuan untuk mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas, menyamakan skala data, serta menghindari terjadinya heteroskedastisitas (ketidaksamaan varians residual). Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk persamaan logaritma natural, di mana variabel dependen dan variabel independen ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural (ln). Hal ini dilakukan untuk menyamakan satuan dan skala data serta memenuhi asumsi klasik agar hasil analisis regresi lebih akurat dan terpercaya. Sehingga Model logaritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk logaritma natural :

$$\text{Ln}Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_2 + \beta_3 \text{Ln}X_3 + \mu$$

Keterangan :

Ln = Logaritma Natural

Y = Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah (%)

X1 = Tingkat Pengangguran (%)

X2 = Upah Minimum Provinsi (Rp)

X3 = Pertumbuhan Ekonomi (%)

B0 = Konstanta

B1, B2, B3 = Koefisien Regresi

μ = Variabel pengganggu

HASIL DAN ANALISIS

Penduduk

TABEL 2 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan	
2019	1.420.291	1.294.568	2.714.859
2020	1.385.705	1.284.264	2.669.969
2021	1 401 573	1 300 597	2.702.170
2022	1 420 881	1 320 194	2.741.075
2023	1.421.950	1.331.099	2.753.049

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

Berdasarkan data proyeksi penduduk, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 tercatat sebesar 2.714.859 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.420.291 jiwa adalah penduduk laki-laki dan 1.294.568 jiwa adalah penduduk perempuan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, data terbaru menunjukkan total penduduk Kalimantan Tengah mencapai 2.753.049 jiwa, dengan rincian 1.421.950 jiwa penduduk laki-laki dan 1.331.099 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian, terjadi pertambahan penduduk yang cukup signifikan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Karakteristik Deskripsi Variabel

Tingkat Kemiskinan

Tabel 3
Klasifikasi Variabel Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 - 2023

No	Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)
1	2014	6,07
2	2015	5,94
3	2016	5,66
4	2017	5,37
5	2018	5,17
6	2019	4,98
7	2020	4,82
8	2021	5,16
9	2022	5,28
10	2023	5,11

Sumber : : Hasil Pengolahan Data, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

Berdasarkan Tabel 3 yang disajikan, data dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan yang berfluktuasi. Meski demikian, angka kemiskinan di wilayah tersebut masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan persentase sebesar 6,07%, sedangkan tingkat terendah dicapai pada tahun 2020 dengan angka 4,82%.



Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4
Klasifikasi Variabel Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalteng Tahun 2014 - 2023

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2014	6,21
2	2015	7,01
3	2016	6,36
4	2017	6,74
5	2018	5,64
6	2019	6,16
7	2020	1,40
8	2021	3,40
9	2022	5,70
10	2023	4,14

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024
Berdasarkan data yang tersedia, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah cenderung mengalami penurunan secara fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023, tingkat pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,14%, mengalami penurunan sebesar 1,56% dari angka 5,70% pada tahun 2022. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Tabel 5
Klasifikasi Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) Di Provinsi Kalteng Tahun 2014 -2023

No	Tahun	Upah Minimum Provinsi (UMP) (Rp)
1	2014	1.723.970
2	2015	1.896.367
3	2016	2.057.558
4	2017	2.227.307
5	2018	2.421.305
6	2019	2.663.435
7	2020	2.903.144
8	2021	2.903.144
9	2022	2.922.516
10	2023	3.181.013

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

Berdasarkan data pada tabel, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kalimantan Tengah merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan daerah. Dalam rentang waktu dari tahun 2014 hingga 2020, UMP di wilayah tersebut terus mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat. Selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga 2023, UMP di Kalimantan Tengah juga mengalami kenaikan secara berkelanjutan. Pada tahun 2016, UMP tercatat sebesar Rp. 2.663.435,- dan meningkat menjadi Rp. 3.181.013,- pada tahun 2023, dengan kenaikan sebesar Rp. 487.578,-. Kebijakan peningkatan UMP ini merupakan langkah yang positif, karena seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, pendapatan pekerja juga harus disesuaikan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan keluarga.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Tengah adalah persentase pengangguran dibandingkan dengan jumlah pekerjaan dari tahun 2015 hingga 2019. Tingkat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Klasifikasi Variabel Tingkat Pengangguran Di Provinsi Kalteng Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Tingkat Pengangguran (%)
1	2014	3,24
2	2015	4,54
3	2016	4,82
4	2017	4,23
5	2018	3,91
6	2019	4,04
7	2020	4,58
8	2021	4,53
9	2022	4,26
10	2023	4,10

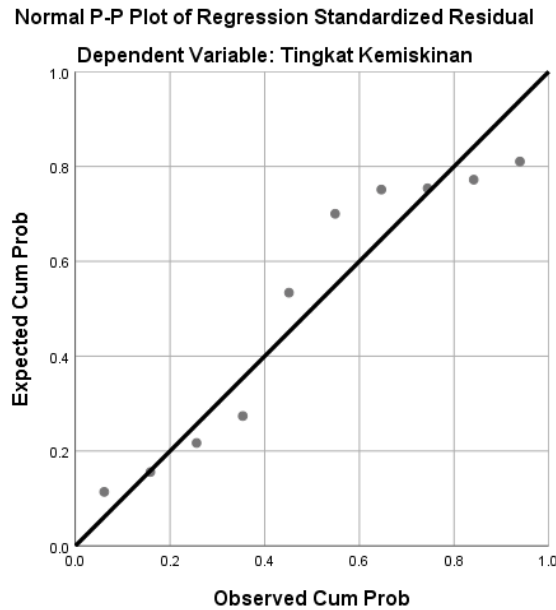
Sumber : Hasil Pengolahan Data, Badan Pusat Statistik Provinsi. Kalimantan Tengah, 2024
Berdasarkan data pada tabel 6, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi penurunan dari tahun 2019 hingga 2023. Meskipun demikian, angka pengangguran di wilayah tersebut masih perlu menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mengatasi masalah pengangguran. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan angka 4,82%, yang juga berkaitan dengan peningkatan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, tingkat pengangguran terendah tercatat pada tahun 2014 dengan angka 3,24%. Namun, dalam 5 tahun terakhir, terdapat kecenderungan penurunan yang signifikan, dimana pada tahun 2023, tingkat pengangguran mencapai 4,10%. Capaian ini merupakan prestasi terbaik pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah, salah satunya dengan menambah lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Regresi memenuhi asumsi normalitas karena titik menyebar mengikuti garis diagonal

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas



Uji Multikolinieritas

Berdasarkan pengujian multikolinieritas, diperoleh hasil bahwa nilai R² mendekati angka 1, yang ditunjukkan oleh nilai R-square. Selain itu, tidak terdapat nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang melebihi 10 dan nilai tolerance tidak ada yang berada di bawah 0,10 untuk ketiga variabel yang diuji. Kondisi ini mengindikasikan bahwa model regresi tersebut terbebas dari masalah multikolinieritas.

**Tabel 7
Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	CollinearityStatistic	
	Toleranc	VIF
Tingkat Pengangguran (X1)	0,925	1.081
UMP (X2)	0,522	1.917
Pertumbuhan Ekonomi (X3)	0,521	1.919

Uji Autokorelasi

Sumber : Hasil analisis, 2024

Berdasarkan uji autokorelasi, tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi yang digunakan. Hal ini dibuktikan dengan nilai statistik Durbin-Watson sebesar 0,485. Model regresi dinyatakan bebas dari autokorelasi jika nilai Durbin-Watson berada dalam rentang antara batas atas (dU) dan 4 dikurangi batas atas (4-dU). Berdasarkan data yang ada, diperoleh nilai batas atas (dU) sebesar 2,0163 dan 4-dU sebesar 1,9837. Oleh karena nilai Durbin-Watson 0,485 berada di antara 2,0163 dan 1,9837, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut terbebas dari masalah autokorelasi.

**Tabel 8
Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
-------	---	----------	-------------------	----------------------------	---------------



1	.869 _a	.756	.633	.24816	0.485
---	-------------------	------	------	--------	-------

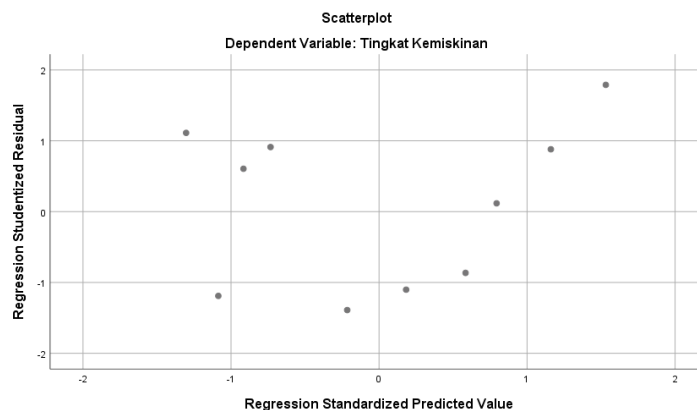
Sumber : Hasil analisis Data , 2024 SPSS

Berdasarkan data yang diberikan, nilai statistik Durbin-Watson adalah 0,485. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, digunakan kriteria nilai Durbin-Watson harus berada di antara batas atas (dU) dan 4 dikurangi batas atas (4-dU). Dengan jumlah observasi sebanyak 10 time series dan 3 variabel independen, diperoleh nilai dU sebesar 2,0163 dan 4-dU sebesar 1,9837. Oleh karena nilai Durbin-Watson 0,485 tidak berada di antara 2,0163 dan 1,9837, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan menganalisis pola grafik scatter plot, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pola yang jelas atau titik-titik tersebar secara acak. Kondisi ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Analisis Regresi Linier Berganda

pada hasil uji regresi linier berganda diperoleh penelitian sebagai berikut :

Tabel 9

Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sig/Prob	Keterangan
Konstanta	6.921	5.989	0.001	
TPT (X1)	-0.036	-0.187	0.858	Tidak Signifikan
UMP (X2)	-0.630	-2.742	0.034	Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi (X3)	0.029	0.452	0.667	Tidak Signifikan

F hitung = 6,181
F tabel = 4,53
SIG F = 0,029
Tabel = 1,943
R = 0,869
R-Square = 0,756

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2024, SPSS

Persamaan berikut menggunakan model analisis regresi linier berganda bentuk logaritma natural (LN) :

$$\text{Ln } Y = 6,921 - 0,036 \text{ Ln}X_1 - 0,630 \text{ Ln}X_2 + 0,029 \text{ Ln}X_3 + \mu$$

Berdasarkan persamaan regresi linear diatas berikut penjelasan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 6,921 menunjukkan bahwa apabila Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran diasumsikan bernilai nol, maka Tingkat Kemiskinan akan berada pada angka 6,921.
2. Koefisien Pertumbuhan Ekonomi (X_1) tidak memberikan pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Artinya, meskipun terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran sebesar 1 persen dengan asumsi Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Provinsi tetap, tidak akan berdampak pada perubahan Tingkat Kemiskinan karena variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
3. Koefisien Upah Minimum Provinsi (UMP) (X_2) sebesar -0,630 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar 1% dengan asumsi X_1 (Tingkat Pengangguran) dan X_2 (Pertumbuhan Ekonomi) tetap, akan mengakibatkan penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar 0,630 %.
4. Koefisien Pertumbuhan Ekonomi (X_3) tidak memberikan pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini berarti, meskipun terjadi peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% dengan asumsi Variabel X_2 (UMP) dan X_1 (Tingkat Pengangguran) tetap, tidak akan berdampak pada perubahan Tingkat Kemiskinan karena variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

Dari hasil analisis regresi, ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi (UMP), dan Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. R^2 sebesar 0,756 menunjukkan bahwa 75,6% variasi Tingkat Kemiskinan dapat dijelaskan oleh kombinasi tiga variabel independen tersebut, sementara sisanya 24,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.

Selanjutnya, uji hipotesis simultan menggunakan uji F dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara bersamaan. Hasil regresi menunjukkan bahwa F-Hitung sebesar 6,181 lebih besar dari F-Tabel 4,53 dan probabilitas F-statistik 0,029 lebih kecil dari 0,05 (α). Dengan demikian, disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi (UMP), dan Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh simultan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Uji statistik T digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variasi Tingkat Kemiskinan. Dengan demikian, dapat diketahui mana variabel yang memiliki pengaruh paling signifikan dan mana yang memiliki pengaruh yang lebih kecil.

Pengaruh Tingkat Pengangguran (X_1) terhadap Tingkat Kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis, Variabel Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar -0,187 dan signifikansi t sebesar 0,858, sedangkan nilai t-tabel adalah 1,943. Kondisi tersebut

mengindikasikan bahwa Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga hipotesis penelitian ini tidak dapat diterima. Artinya, Tingkat Pengangguran yang ada belum efektif dalam upaya menekan angka Kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila Tingkat Pengangguran tinggi, maka akan berdampak pada peningkatan Tingkat Kemiskinan di wilayah tersebut.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi (X2) terhadap Tingkat Kemiskinan

Penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -2,742 dan signifikansi t sebesar 0,034, yang berarti bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan 6, nilai t-tabel diperoleh sebesar 1,943. Karena nilai t-hitung (-2,742) lebih kecil daripada nilai t-tabel (1,943), maka dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat upah minimum provinsi, maka tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah akan semakin rendah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi(X3) terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji T, variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar 0,452 dan signifikansi t sebesar 0,667. Pada tingkat signifikansi (α) 0,05 dan derajat kebebasan (df) sebesar 6, nilai t-tabel yang diperoleh adalah 1,943. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga hipotesis dalam penelitian tersebut tidak terbukti. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum efektif dalam menurunkan Tingkat Kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi masih belum mampu secara optimal dalam menekan angka kemiskinan.

Faktor yang Dominan Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan.

Faktor yang paling mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah variabel-variabel independen yang ditemukan. Variabel-variabel tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi (UMP), dan tingkat pengangguran. Dalam analisis statistik, variabel upah minimum provinsi (UMP) menunjukkan nilai T hitung yang lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya, dengan nilai T hitung sebesar -2,742 dan tingkat probabilitas sebesar 0,034. Karena nilai T hitung ini lebih kecil dari nilai T tabel (1,943), maka dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum provinsi (UMP) memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

kesimpulan

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Tingkat Pengangguran (X1), Upah Minimum Provinsi (UMP) (X2), dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Kalimantan Tengah. Tingkat Pengangguran (X1), dan Upah Minimum Provinsi (X2) memberikan pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Kalimantan Tengah. Namun Pertumbuhan Ekonomi (X1) secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Kalimantan Tengah. Variabel Upah Minimum Provinsi (X2) merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap Tingkat Kemiskinan di wilayah tersebut.

Saran

Pemerintah harus mengembangkan program dan kebijakan sosial yang berdampak signifikan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan serta sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan yang memungkinkan warga bersaing dengan tenaga kerja lokal maupun asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, P. G. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah*, Program Studi Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
- BPS. (2024, Mei 04). *Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia*. Retrieved from <http://bps.go.id>
- BPS. (2024, Mei 05). *Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah*. Retrieved from <http://Kalteng.bps.go.id>
- Gani Irwan, S. (2015). *Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hidayat, W. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Timur*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ikhsan, K. (2018). Analisis Pengaruh Ump, Inflasi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Vol. 3 No. 3 Agustus 2018 : 408 -419*, Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- RPJMD. (2016-2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Seri Jefri, A. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, Dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1995 – 2014 (Skripsi). *Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*.
- Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu Yogyakarta.
- Sumedi, S. d. (2004). Kemiskinan di Indonesia : Suatu Fenomena Ekonomi. *Icaserd Working Paper Pusat Penelitian Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Departemen Pertanian*, 21.
- Todaro, M. (2000). *Economic Development, Six Edition*. Harlow: Addison-Wesley.
- Umar, H. (2007). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yanti, N. (2011, 28 Agustus). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1999 - 2009*. Retrieved from <http://repository.upnyk.ac.id/1662>